

## DAFTAR PUSTAKA

- Djumbuhana Muhamad, 2006, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Fuady Munir, 2005, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), Citra Aditya Bakti, Bandung
- H.S. Salim, 2003, Hukum Kontrak – Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Mataram
- H.S. Salim, 2004, Perkembangan Hukum Jaminan di Indoensia, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta
- I Mehr Robert & Cammack Emerson, 1957, Principles of Insurance, Richard D. Irwin Inc., Illinois
- Ivamy E.R. Hardy, 1981, Dictionary of Insurance Law, Butterworth & Co (Publisher) Ltd, London
- Mahfud MD Moh., 2012, Politik Hukum di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Muhammad Abdulkadir, 2006, Hukum Asuransi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Parsons Chris, 1999, Legal Aspect of Insurance, The Chartered Insurance Isntitute, Great Britain
- Purwosutjipto, 2003, Pegertian Pokok Hukum Dagang Indonesia – Hukum Pertanggung, Penerbit Djambatan, Jakarta
- Satrio J, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi: Tentang Perjanjian Penanggung dan Perikatan Tanggung Menanggung, Jakarta
- Sembiring Sentosa, 2000, Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung
- Sembiring Sentosa, 2008, Hukum Dagang, Citra Aditya Bakti, Bandung

Setiawan R., 1999, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Putra Abardin, Bandung..

Sudarto, 1996, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung

Soemitro Ronny Hanitijo, 1994, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,  
Ghalia Indonesia, Jakarta

Suparman Sastrawidjaja Man dan Endang, 1997, Hukum Asuransi-Perlindungan  
Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian, Penerbit Alumni,  
Bandung

T. Allen Francis & I. Simon Sidney, 1956, Insurance General Principles,  
Littlefield Adams & Co, New York

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2001,  
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4150 Tahun 2001)

Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1992, Tambahan Lembaran  
Republik Indonesia Nomor 3467 Tahun 1992)

Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan  
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2012, Tambahan  
Lembaran Republik Indonesia Nomor 5334 Tahun 2012)

Keputusan Menteri keuangan No. 243/ KMK.011/ 1985 tanggal 5 Maret 1985

Surat Keputusan Menteri keuangan No. 761/KMK.011/1992 tanggal 13 Juli 1992

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. SE-04/ NB/ 2013 Tentang Pencantuman Klausula Dalam Suretyship Untuk Tidak Menjamin Kerugian Yang Disebabkan Oleh Praktek Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. S.127/ NB.2/ 2014 Tentang Pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. SE-04/ NB/ 2013 Tentang Pencantuman Klausula Dalam Suretyship Untuk Menjamin Kerugian Yang Disebabkan Oleh Praktek Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-3296/NB.111/2016 Tentang Persetujuan Polis Standar Surety Bond

Polis Standar Surety Bond Indonesia

Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia

Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia

Marine Insurance Act 1906